
PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA PAMAIT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022

Harlina Kurniaty

STIE Dahanai Dahanai,
Buntok, Kalimantan Tengah,
Indonesia

email:

lylin0722@gmail.com

Kata Kunci:

Transparansi
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintahan Desa

Keywords:

Transparency
Accountability
Performance
Village Administration

Accepted

Januari 2023

Published

April 2023

Abstrak

Kegiatan penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui kinerja dari Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak keberhasilan program pemerintah selama ini, apakah sudah betul dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas, yang mana tujuan akhirnya nanti bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkannya.

Teori yang digunakan untuk Transparansi menurut Mardiasmo (2006), Akuntabilitas menurut Rasul (2002), Kinerja menurut Mohammad Nahsun (2009) Metode penelitian menggunakan Analisis Kuantitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah Interview (wawancara), Kuesioner (Angket), Observasi, dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 3 Variabel yaitu Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kinerja (Y) Pemerintahan Desa Pamait. Alat Analisis Data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS Versi 26.

Pengaruh Akuntabilitas (X₂) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar t tabel (2,111 > 1,996) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,038 < 0,05), maka dapat dikatakan bahwa Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Pamait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₂ dalam penelitian ini H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya hipotesis penelitian ini sudah benar.

Pengaruh Transparansi (X₁) dan Akuntabilitas (X₂) terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) secara simultan. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diperoleh nilai F_{hitung} < F_{tabel} (2,251 < 2,72) dan nilai signifikan > 0,05 (0,113 > 0,05). Maka dapat disimpulkan H₀ diterima dan H_a ditolak yang artinya Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₃ dalam penelitian ini H₀ diterima dan H_a diterima, artinya hipotesis penelitian ini belum benar.

Abstract

This research activity was carried out in order to find out the performance of the Village Government as the spearhead of the success of government programs so far, whether they have been properly implemented in a transparent and accountable manner, which ultimately aims to be felt and utilized by the people who really need them.

The theory used for Transparency according to Mardiasmo (2006), Accountability according to Rasul (2002), Performance according to Mohammad Nahsun (2009) Research methods using Descriptive Quantitative Analysis with data collection techniques are Interviews, Questionnaires, Observation, and Documentation. This study uses 3 variables, namely Transparency (X₁), Accountability (X₂), and Performance (Y) of Pamait Village Government. The data analysis tool used is Multiple Linear Regression using SPSS Version 26.

Effect of Accountability (X₂) on Village Government Performance, showing that the t-count value is greater than t-table (2.111 > 1.996) and the significant value is less than 0.05 (0.038 < 0.05), so it can be said that Transparency partially affects Village Government Performance in Pamait Village. So it can be concluded that H₂ in this study H₀ is rejected and H_a is accepted, meaning that the research hypothesis is correct.

The Effect of Transparency (X₁) and Accountability (X₂) on Village Government Performance (Y) simultaneously. Based on the results of the regression analysis in the table, the value of F_{count} < F_{table} (2.251 < 2.72) and a significant value > 0.05 (0.113 > 0.05) is obtained. So it can be concluded that H₀ is accepted and H_a is rejected, which means that Transparency and Accountability simultaneously do not significantly influence Village Government Performance, so it can be concluded that H₃ in this study H₀ is accepted and H_a is accepted, meaning that the research hypothesis is not correct.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 bertujuan untuk mengatur penggunaan dan peruntukan keuangan Negara secara tepat agar dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengatur realisasi penggunaan keuangan yang sesuai dan dapat pertanggungjawabkan, sangatlah perlu adanya pengaplikasian dan peningkatan sektor akuntansi publik yang dilaksanakan untuk menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik secara umum demi meraih good governance (Mardiasmo, 2006).

Konseptualisasi good governance banyak menitik beratkan kepada tercapainya demokrasi bersama, dalam penyelenggaraan negara secara demokratis mutlak sebagai salah satu syarat meraihnya good governance, berlandaskan suatu tanggungjawab dilakukan dengan transparan dan akuntabel. yang merujuk kepada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Tingkat Desa pasal 2 ayat (1) yang mengatakan pengelolaan keuangan di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan secara disiplin dan tertib dan dalam anggaran.

Akuntabilitas serta transparansi pada tata Kelola suatu pendanaan di desa merupakan bentuk pelaksanaan manajemen keuangan yang bagus yang tentunya menjunjung konsep keterbukaan serta logis, komponen tersebut akan mempengaruhi kinerja para pengelola terutama melalui penilaian masyarakat atas kinerja tersebut.

Desa Pamait merupakan salah satu desa yang memiliki luas batas wilayah 29,00 Km² dan data jumlah penduduk sebanyak **1.019** (September Tahun 2021) dengan jumlah penduduk Pria berjumlah **533**, penduduk wanita **486**, yang mana merujuk dengan jumlah Kepala Keluarga adalah **318 KK**.

Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan akan terlihat melalui masyarakat yang tidak ikut dilibatkan secara langsung dalam mengambil kebijakan. Survey pendahuluan juga menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang adanya dana desa dan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana

desa, seperti dilansir salah satu kabar berita cetak dan media masa dari ICW (Indonesia Corruption Watch) maupun Berita Kalteng Kabupaten Barito Selatan menyerahkan berkas kasus penyimpangan dana desa di Kecamatan Dusun Selatan. Fenomena pengelolaan dana desa menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dapat ditelaah kedepannya, berdasarkan artikel dan beberapa sumber menyatakan masih banyak disajikan data-data keuangan yang tidak sesuai.

Penelitian ini mengukur pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja pada pemerintahan Desa Pamait. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Melakukan Analisis terhadap pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait Kabupaten Barito Selatan Periode Maret 2022. (2) Menganalisis pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait Kabupaten Barito Selatan Periode Maret 2022. (3) Menganalisis pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara simultan (Bersama-sama) terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait Kabupaten Barito Selatan.

LANDASAN TEORI

Manajemen

Menurut KBBI, Manajemen adalah ilmu & seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan pada usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sendiri memiliki kegiatan/aktivitas memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, serta juga mengembangkan.

Menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik garis besar bahwa Manajemen merupakan seni dan ilmu

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Manajemen Keuangan

Menurut Sutrisno (2009) Manajemen Keuangan adalah Sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Menurut Darsono (2011:101) Manajemen Keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah- murahya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan pengertian diatas Manajemen Keuangan merupakan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah.

Transparansi

Definisi Transparansi menurut Ahli

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur.akepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Menurut Hadi (2010) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai

setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Prinsip-prinsip Transparansi:

Terdapat 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Akuntabilitas

Definisi Akuntabilitas menurut Ahli

Menurut Ensiklopedia Kementrian Keuangan, Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik pemerintahan yang baik (good governance), di mana semua pihak (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya (stakeholders-nya). Secara umum, organisasi atau institusi harus **akuntabel** kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Menurut Sjahrudin Rasul (2003:08) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek-aspek Akuntabilitas

Menurut Paul (dalam Supriatna, 2001) akuntabilitas dapat dibedakan atas : democratic accountability, professional accountability, and legal accountability.

1. **Democratic Accountability.** Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara- negara demokratis , menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing.
2. **Profesional Accountability.** Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.
3. **Legal Accountability.** Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Akuntabilitas dalam penelitian ini termasuk ke dalam legal accountability atau akuntabilitas yang pelaksanaannya didasarkan atas hukum, dimana pengelolaan keuangan desa

dilakukan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada dan jika pemerintah desa maupun tim pelaksana keuangan desa melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa maka mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Akuntabilitas :

Menurut Sjahruddin Rasul (2003:21), menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Pertanggung jawaban hukum
2. Pertanggung jawaban kinerja
3. Pertanggung jawaban program
4. Pertanggung jawaban kebijakan
5. Pertanggung jawaban finansial

Kinerja

Definisi Kinerja menurut Ahli

Menurut Buku Pedoman pengukuran Kinerja Sektor Publik, Mohamad Mahsun (2006:25) Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Menurut Mustopadidjaja (2000:18) Kinerja adalah kemampuan dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih baik atau yang lebih menonjol kearah tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan.

Menurut LAN dan BPKP (Pengukuran kinerja instansi pemerintah) Kinerja Instansi Pemerintah adalah "Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimasukkan untuk berperan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan/hukuman (reward/punishment), akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi".

Beberapa pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kinerja adalah kemampuan yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan bersama kearah tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan.

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan, organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

Manfaat Penilaian Kinerja

Untuk itu penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemitivasi karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Indikator Kinerja

Menurut Mohamad Mahsun (2006:77), Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan, dengan memperhatikan elemen indikator yang terdiri atas :

1. Indikator Masukan (input). Input adalah segala sesuatu yang di butuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dan, sumber daya manusia, informasi, kebijakan peraturan

undang-undang, dan sebagainya.

2. Indikator Keluaran (output). Output adalah sesuatu yang di harapkan langsung di capai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
3. Indikator Hasil (outcome). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Manfaat-Dampak (benefit-Impact). Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dampak (Impact) adalah pengaruh yang di timbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah di tetapkan.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut di kelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan wajib menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas Sekertaris desa, Kepala seksi dan Bendahara desa. Sekertaris selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa. Laporan yang disampaikan oleh kepala desa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah di tetapkan dengan peraturan desa dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan yang di maksud harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan tahun 2022

Responden Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Masyarakat yang ada di Desa Pamait, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 yang berjumlah 76 KK. **Teknik**

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Kuesioner.

Metode Analisis Data

- Uji Validitas Data
- Uji reabilitas Data
- Uji Asumsi Klasik
- **Analisis Regresi Berganda**

Rumus regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \epsilon$$

Rumus untuk mencari koefisien a dan b digunakan rumus :

$$a = \frac{\Sigma Y - b \Sigma X}{n}$$

$$b = \frac{n \Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Uji T

Rencana pengujian hipotesis yang di uji pada penelitian ini adalah mengenai ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, signifikan artinya berarti atau berpengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan),

H1 : Di duga bahwa Transparansi (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) secara Parsial.

H2 : Di duga bahwa Akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) secara Parsial.

H3 : D iduga bahwa secara bersamaan Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) secara Simultan.

PEMBAHASAN

Rekapitulasi Jawaban kuisisioner

Rekapitulasi Hasil jawaban kuisisioner yang di dapat dari 76 KK, responden adalah Masyarakat desa pamait yang tersebar di RT.I, RT.II, RT.III dan RT.

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Untuk Mengukur Pengaruh Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Analisis Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil yang diperoleh dalam perhitungan regresi linear berganda adalah

$Y = 25,812 + 0,013X_1 + 0,150X_2$ dimana nilai (a) sebesar 25,812 dan nilai koefisien (b_1) adalah 0,013 dan nilai koefisien (b_2) adalah 0,150.

Analisis Regresi Variabel Transparansi (X_1)

Pengaruh Transparansi (X_1) nilai skornya adalah 0, sehingga Kinerja Pemerintahan Desa (Y) nilai skornya sebesar 25,812. Kemudian koefisien regresi (b_1) pada variabel Transparansi (X_1) dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,013, artinya jika nilai skor Kinerja Pemerintahan Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,013 serta koefisien akan bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara Transparansi dengan Kinerja Pemerintahan Desa. Semakin tinggi nilai Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa maka akan semakin meningkat Kinerja Pemerintahan Desa.

Hasil dari penelitian ini dapat dihubungkan bahwa Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa. Sehingga Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa dapat memberikan kontribusi yang bagus atau positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. Kemudian pada akhirnya Transparansi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa dapat memberikan bentuk keterbukaan transparan kepada masyarakat Desa Pamait dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Marni S.Pd I** Kepala Desa Pamait :

“**Marni S.Pd I** mengatakan, jika Dana Desa (DD) dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk Desa Pamait setiap tahun selalu diinformasikan kepada masyarakat dengan acuan besaran Pagu Dana Desa dari pemerintah pusat. Adapun bentuk langkah kegiatan kerja yang dilakukan Pemerintah Desa Pamait dalam penyerapan penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) di masyarakat ialah melaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan bidang prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan juga siapa saja warga masyarakat yang bisa memperoleh hak dalam menerima Dana Desa (DD)”

Penjelasan diatas dapat peneliti jelaskan bahwa pada setiap tahunnya Dana Desa (DD) tersebut diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa dengan besaran keuangan Dana Desa sesuai pagu anggaran dari pemerintah pusat guna keterbukaan secara transparan penggunaan biaya

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.dalam Dana Desa (DD). Kemudian ada dapat terlihat bentuk langkah kegiatan kerja yang dilakukan Pemerintahan Desa dalam penyerapan penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) di masyarakat setelah pagu Dana Desa (DD) diketahui, Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat melaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan bidang prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tersebut yang akan dilaksanakan sampai pada bentuk keterbukaan yang transparan kepada semua warga masyarakat yang berhak merasakan manfaat pembangunan dari Dana Desa (DD), namun tetap berkaitan dengan BLT harus menyesuaikan aturan dan persyaratan yang berlaku dan tidak seluruh warga desa yang akan mendapatkan.

I. Analisis Regresi Variabel Akuntabilitas (X_2)

Pengaruh Akuntabilitas (X_2) nilai skornya adalah 0, sehingga Kinerja Pemerintahan Desa (Y) nilai skornya sebesar 25,812. Kemudian koefisien regresi (b_2) pada variabel Akuntabilitas (X_2) dalam Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,150, artinya jika nilai skor Kinerja Pemerintahan Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,150 serta koefisien akan bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara Akuntabilitas dengan Kinerja Pemerintahan Desa. Semakin tinggi nilai Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa maka akan semakin meningkat Kinerja Pemerintahan Desa.

Hasil dari penelitian ini dapat dihubungkan bahwa Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa. Sehingga Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dapat memberikan kontribusi yang bagus atau positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. Kemudian pada akhirnya Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintahan Desa dapat memberikan bentuk Pertanggung Jawaban Akuntabilitas kepada masyarakat Desa Pamait dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Marni S.Pd I** Kepala Desa Pamait :

“**Marni S.Pd I** mengatakan, Dana Desa (DD) turun adapun bentuk peraturan dan aturan yang mengiringi atas penggunaan dana tersebut dalam bentuk pertanggung jawaban Dana Desa dibuat yang sampai pada dalam penggunaan Dana Desa itu ada pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah guna pertanggung jawaban kebenaran pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pamait.”

Penjelasan diatas dapat peneliti jelaskan bahwa selalu ada peraturan yang mengatur atas penggunaan Dana Desa (DD) kesetiap desa baik dari Kemendes PDT dan Peraturan Bupati sebagai dasar payung hukumnya atas setelah Dana Desa (DD) tersalurkan, akan segera diminta kembali pertanggung jawaban lengkap berupa Nota dan kwitansi, photo dokumentasi kegiatan dan lampiran Surat Tugas maupun Surat Keputusan sebagai dasar bukti kebenaran yang ada. Kemudian sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Dana Desa yang mengacu pada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) maka akan ada pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan oleh Pemerintah bersama unsur terkait, baik kecamatan, Dinas PMD, Kantor Inspektorat, BPKP, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Analisis Hipotesis Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan) dan Variabel yang paling berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

H₁ Pengaruh Transparansi (X₁) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,071 < 1,993$) signifikan dari variabel Transparansi $0,944$ lebih besar dari $0,05$ ($0,944 > 0,05$), artinya H₀ diterima dan H_a ditolak yang secara parsial Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait, **H₁ dalam penelitian ini belum benar.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat Desa bagian Sekretaris Desa Pamait **Alsaahid, SE** mengatakan bahwa :

“Hal itu tidak berpengaruh karena Transparansi adalah bentuk Keterbukaan Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan – kebijakan anggaran (Keuangan) Desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan

pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.”

Dari teori terdahulu variabel Transparansi (X₁) menurut Mardiasmo (2006) adalah suatu penyampaian informasi dari pemerintah yang dilakukan secara terbuka terhadap aktifitas kegiatan pengelolaan sumber daya publik terhadap mereka yang memerlukan.

Dari sudut pandang penelitian terdahulu dari Siti Wardah Pratidina (2021), Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengolah hasil kuesioner dan telah menggunakan beberapa pengujian melalui software SPSS versi 18,0, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa tabel Coefficientsa diperoleh persamaan regresi $Y = 32,696 + 0,069X_1 + 0,200X_2$. Konstanta (a) = 32,696 bertanda positif dan transparansi 0,069 bertanda positif serta akuntabilitas 0,200 juga bertanda positif , artinya adalah transparansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja pengelola anggaran. Secara parsial variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Kantor Balai Pengembangan Kompetensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Wilayah I Medan.

Hasil observasi temuan peneliti pada saat melakukan observasi di Desa Pamait bentuk Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa ada terdapat pelaksanaan dalam pengelolaan Keuangan Desa, yang didasari oleh adanya Transparan / Keterbukaan terhadap warga masyarakat. Dengan adanya hubungan yang baik dan harmonis antara Pemerintah Desa dan warga masyarakat berdampak tidak terjadinya mekanisme pengaduan dalam bentuk apapun oleh warga masyarakat nya sendiri.

H₂ Pengaruh Akuntabilitas (X₂) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,111 > 1,993$) signifikan dari variabel Akuntabilitas $0,944$ lebih kecil dari $0,05$ ($0,038 < 0,05$), artinya H₀ ditolak dan H_a diterima yang secara parsial Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait, **H₁ dalam penelitian ini sudah benar.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Mukhlis Azami, Amd** Kaur Keuangan Desa Pamait mengatakan bahwa :

“Tentang Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa (DD), yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan desa.”

Dari teori terdahulu variabel Akuntabilitas (X_2) menurut Dr. Sjahruddin Rasul (2003) adalah Kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Dari penelitian terdahulu dari Risyia Umami (2017), hasil hipotesis terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis pengolahan data bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,207 > 2,017$) sehingga H_2 diterima. Adapun adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Hasil observasi temuan peneliti pada saat melakukan observasi di Desa Pamait bentuk Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam sistem pengelolaan keuangan Desa berupa pertanggung jawaban secara tertulis dan lengkap semua disampaikan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku untuk Dana Desa yang mana semuanya berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengambil unsur – unsur program skala prioritas di Desa itu sendiri sehingga semua bisa diterima oleh masyarakat. Dengan adanya proses tersebut mampu menjalin kebersamaan dan keharmonisan antara warga masyarakat sendiri dengan pemerintah desa.

H₃ Pengaruh Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y)

Berdasarkan hasil analisis pada regresi pada tabel 4.56 di peroleh nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2,251 < 2,72$) dan nilai signifikan $> 0,05$ ($0,113 > 0,05$) Maka dapat disimpulkan H_0 diterima H_a ditolak yang artinya Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan (bersama – sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pamait **Marni S.Pd I** mengatakan bahwa :

“Pada dasar Transparansi adalah bentuk Keterbukaan Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan – kebijakan anggaran (Keuangan) Desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan pemangku kepentingan lainnya dan Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa (DD) yang berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam membawa jalinan kebersamaan dan keharmonisan antara warga masyarakat dengan pemerintah desa pamait.”

Hasil observasi temuan peneliti pada saat melakukan observasi di Desa Pamait bahwa benar adanya pelaksanaan dalam pengelolaan Keuangan Desa, yang didasari oleh adanya Transparan / Keterbukaan terhadap warga masyarakat dan sistem pengelolaan keuangan Desa berupa pertanggung jawaban secara tertulis dan lengkap semua disampaikan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku untuk Dana Desa yang mana semuanya berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengambil unsur – unsur program skala prioritas di Desa itu sendiri sehingga semua bisa diterima oleh masyarakat.

H₄ Variabel yang paling berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y)

Dari variabel Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) yang berpengaruh yaitu Akuntabilitas (X_2), dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,111 > 1,993$) signifikan dari variabel Akuntabilitas 0,038 lebih kecil dari 0,05 ($0,038 < 0,05$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima yang secara parsial Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait,

Dari teori terdahulu variabel Akuntabilitas (X_2) Akuntabilitas adalah Kemampuan memberi jawaban kepada

otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Hasil observasi temuan peneliti pada saat melakukan observasi di Desa Pamait bentuk Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam sistem pengelolaan keuangan Desa berupa pertanggung jawaban secara tertulis dan lengkap semua disampaikan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku untuk Dana Desa yang mana semuanya berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengambil unsur – unsur program skala prioritas di Desa itu sendiri sehingga semua bisa diterima oleh masyarakat. Dengan adanya proses tersebut mampu menjalin kebersamaan dan keharmonisan antara warga masyarakat sendiri dengan pemerintah desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil Uji Validitas pada variabel (X_1) Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa, dengan pernyataan “Adanya mekanisme pengaduan oleh pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran ketidaksesuaian Pengelolaan Dana Desa” pada indikator X_1 Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi, memiliki skor nilai T8 / P8 paling tinggi yaitu 0,864.
2. Dari hasil Uji Validitas pada variabel (X_2) Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa, dengan pernyataan “Kebijakan dalam penggunaan Dana Desa merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah bersama Masyarakat” pada indikator X_2 Pertanggung Jawaban Kebijakan dan “Aparat Desa melakukan pertanggung jawaban keuangan secara benar dan tepat sesuai dengan pelaksanaan program kerja di Desa berdasarkan hasil Musyawarah Tingkat Desa” pada indikator X_2 Pertanggung Jawaban Finansial, memiliki skor nilai A8 / P8 dan A9 / P9 paling tinggi yaitu 0,947.
3. Dari hasil Uji Validitas pada variabel (Y) Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, dengan pernyataan “Adanya mekanisme pengaduan oleh pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran ketidaksesuaian Pengelolaan Dana Desa” pada indikator Y Outcome (Hasil), memiliki skor nilai KPD6 / P6 paling tinggi yaitu 0,846.
4. Dari Hasil Uji Reliabilitas pada Variabel Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) didapat nilai Cronbach's Alpha X_1 sebesar 0,734, X_2 sebesar 0,872, X_3 . Maka nilai Cronbach's Alpha 0,734, 0,872 > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut reliabel atau konsisten. Dari hasil uji reliabilitas pada variabel Kinerja (Y) didapat nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,829. Maka nilai Cronbach's Alpha 0,829 > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut reliabel atau konsisten.
5. Berdasarkan hasil penelitian Variabel X_1 Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) dikarenakan dalam pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan baik kewenangan maupun fungsi tugas dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, hal ini didasari oleh adanya keterbukaan terhadap warga masyarakat. Dengan adanya hubungan yang baik dan harmonis antara Pemerintah Desa dan warga masyarakat berdampak tidak terjadinya mekanisme pengaduan dalam bentuk apapun oleh warga masyarakat nya sendiri.
6. Berdasarkan hasil penelitian Variabel X_2 Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) dikarenakan bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan Desa berupa pertanggung jawaban secara tertulis dan lengkap semua disampaikan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku untuk Dana Desa yang mana semuanya berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengambil unsur – unsur program skala prioritas di Desa itu sendiri sehingga semua bisa diterima oleh masyarakat. Dengan adanya proses tersebut mampu menjalin kebersamaan dan keharmonisan antara warga masyarakat sendiri dengan pemerintah desa, ini semua mampu menumbuhkan musi percaya terhadap kinerja pemerintah desa kedepan.
7. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan Regresi Linear Berganda dari rumus $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$ adalah $Y = 25,812 + 0,013X_1 + 0,150X_2$ dimana nilai (a) sebesar 25,812 dan nilai koefisien (b_1) adalah 0,013 dan nilai koefisien (b_2) adalah 0,150.
8. Hasil dari Uji t (Parsial) perhitungan SPSS 26

Transparansi (X_1) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y) Pamait, diperoleh hasil t_{hitung} dari pengujian diatas bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,071 < 1,993$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara Transparansi (X_1) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y) Pamait di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

9. Hasil dari Uji F (Simultan) perhitungan SPSS 26 tentang Pengaruh Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y) secara Simultan yaitu diperoleh nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2,251 < 2,72$) dan nilai signifikan $> 0,05$ ($0,113 > 0,05$), artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y) secara Simultan di Desa Pamait.
10. Berdasarkan dari Uji Regresi Parsial (SPSS 26) antara hasil penelitian variabel X_1 Transparansi dan X_2 Akuntabilitas secara bersama – sama tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap (Y) Kinerja Pemerintahan Desa, karena dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dana Desa dilakukan secara terbuka dan selalu mengacu pada aturan ketentuan bagaimana dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa yang sudah disesuaikan hasil Musyawarah Desa serta program prioritas ditingkat Desa terhadap bidang - bidang penggunaan Dana Desa. Didukung juga penyampaian pelaporan keuangan Dana Desa secara tepat dan benar bisa dipertanggung jawabkan terhadap pemerintah dan diterima oleh warga sendiri. Ini semua mampu menumbuhkan kembangkan musi percaya terhadap Pemerintah Desa dan terjalinnya hubungan yang harmonis.

SARAN

Bahwa kedepannya pemerintahan Desa Pamait tidak hanya dalam memberi informasi kepada warga masyarakat tentang manfaat dan tujuan Dana Desa hanya melewati media sosial dan baleho pengumuman Desa saja, tetapi lebih memanfaatkan peran aktif Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat yang lebih memahami dan mengetahui alur penggunaan Dana Desa. Ini sampaikan secara langsung

kepada masyarakat melewati temu maupun rapat yang bersifat resmi ditingkat Desa.

Dalam proses pelaksanaan Keuangan Desa kedepannya juga bahwa setiap pelaksanaan penggunaan Dana Desa diharuskan selalu dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kuasa pengguna anggaran (Kepala Desa), setelah itu sebelum proses pelaporan dan pertanggung jawaban agar dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim verifikasi yang sudah terbentuk baik ditingkat kecamatan dan kabupaten. Dalam hal ini peran dari inspektorat, BPKP dan BPK sangatlah membantu untuk membenarkan alur dari proses pertanggung jawaban dengan baik.

Kedepannya untuk pelaksanaan pelaporan dilakukan secara bertahap jangan menunggu dead line waktu hamper berakhir baru ingin diproses, jadi setiap pelaporan penggunaan Dana Desa dibuat dan dilengkapi dengan tepat dan benar serta sebaiknya dilakukan dengan sistem jemput bola kepada mereka pengguna Anggaran Dana Desa, dan ini memberi kesempatan ruang dan waktu bagi pemerintahan desa dalam melakukan cross-check atas kelengkapan lampiran – lampiran sebagai data pelengkap pertanggung jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A. R., Solikhah, F. I., Indriyani, N., Sari, D. A. K., Anggraeni, R. N., Ulfa, M., ... & Hidayah, N. (2022). *Pengelolaan Dana Desa*.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Umsida Press, 1-197.
- Garung CY, Ga LL. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *J Akunt Transparansi Dan Akuntabilitas*. 2020;8(1):19-27. doi:10.35508/jak.v8i1.2363
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1).
- Hikmah, L. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar

Kabupaten Banyuwangi (Doctoral dissertation, IAIN Jember).

- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72-98.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Muin, A. (2021). *MANAJEMEN PENDIDIKAN (Good Governance dalam Lembaga Pendidikan) Teori, Strategi, dan Riset Implementasi*.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11-18.